



FOKUS RECOVERY PANDEMI DAN ANTISIPASI TOL

Pemkot Susun Rencana Pembangunan Transisi

YOGYA (KR) - Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan program Pemkot Yogya akan berakhir akhir tahun ini. Kini Pemkot tengah menyusun rencana pembangunan transisi lantaran akan terjadi kekosongan kepala daerah definitif selama dua tahun.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, menjelaskan penyusunan RPJMD transisi tersebut merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Rencana pembangunan transisi itu nanti untuk pedoman 2023 hingga 2026. Ini berlaku bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis tahun 2022," jelasnya, Jumat (4/2).

Selain Kota Yogya, daerah di DIY yang harus menyusun RPJMD transisi ialah Kabupaten Kulonprogo. Berbeda dengan RPJMD sebelumnya yang disahkan dalam bentuk peraturan

daerah (perda), RPJMD transisi ini hanya berbentuk peraturan walikota (perwal). Kendati legalitas atau payung hukumnya lebih rendah namun sudah ada ketentuan dari Mendagri.

Terdapat tiga aspek yang menjadi dasar penyusunan RPJMD transisi tersebut, yakni mampu menyelesaikan persoalan, ada kesinambungan atau kontinuitas serta memiliki visi yang jelas. Heroe menyebutkan, muara dari perencanaan pembangunan ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun masa transisi perlu ada antisipasi terhadap berbagai hal baru yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, salah satu yang harus diantisipasi ialah ketika tol yang tersambung ke Solo dan Bawen sudah beroperasi pada tahun 2024. Dengan begitu mobilitas masyarakat dengan kendaraan pribadi dari arah Solo maupun Semarang bisa langsung menuju Yogya. "Kita bayangkan arus wisatawan yang tadinya melalui Kartasura atau dari Semarang

bisa langsung ke Yogya. Kalau tidak diantisipasi dengan membuat sirip-sirip pembuangan atau sirip-sirip yang bisa menjadi jalan alternatif menuju destinasi di DIY maka akan ada potensi kemacetan yang serius, baik ketika masuk maupun keluar Yogya," paparnya.

Persoalan yang terjadi di Bandung, imbuh Heroe, diharapkan tidak terjadi di Kota Yogya. Terutama ketika dibuka jalan tol Bandung-Jakarta sehingga pada saat tertentu ada kemacetan sangat panjang. Sehingga perlu antisipasi untuk mendistribusikan derasnya arus kendaraan yang berpotensi terjadi di Yogya ketika jalan tol dari Solo dan Bawen sudah dibuka. Kondisi tersebut akan jauh berbeda dengan saat ini karena kendaraan yang akan

masuk dapat terseleksi dari kabupaten atau daerah sekitar. Sedangkan melalui tol, kendaraan bisa masuk bersamaan dalam satu titik dengan volume tinggi.

Di samping itu, pembuatan sirip-sirip atau membuka jalur alternatif pun perlu dikordinasikan lintas daerah di DIY. Hal ini karena destinasi wisata favorit tersebar di wilayah DIY serta merupakan kawasan aglomerasi. Sehingga ketika ada satu kawasan yang mengalami gangguan maka berpotensi mempengaruhi kawasan lain. Dicontohkannya setiap akhir pekan jalur menuju Gunungkidul kerap mengalami kemacetan. Tidak sedikit wisatawan di Gunungkidul hendak menuju Kota Yogya namun ter-

hambat kemacetan.

"Jalur Jalan Lingkar Selatan (JJLS) sudah mulai terbangun juga. Nah sekarang akses jalan antar destinasi di DIY ini diperlukan. Paling tidak penumpukan kendaraan di satu jalur bisa dihindari serta waktu yang terbuang di jalan akibat kemacetan juga bisa dipangkas," urai Heroe.

Selain antisipasi dibukanya tol dari Solo dan Bawen yang menuju Yogya, recovery pandemi dari aspek ekonomi dan sosial budaya juga tetap menjadi fokus RPJMD transisi. Kebangkitan ekonomi yang dibarengi dengan antisipasi saat tol terhubung di Yogya dinilai bisa menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Yogya maupun DIY. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005